

PEREBUTAN KEKUASAAN INTERNAL NU

Oleh : Imam Muslimin

ABSTRAK

Semenjak kelahirannya, NU selalu ditandai dengan berbagai persaingan internal antar faksi yang berebut pengaruh. Buah dari persaingan itu, yang paling nyata, adalah pergeseran pembagian kekuasaan internal. Yang mana, pada saat berdirinya hingga tahun 1950-an, bagian terbesar kekuasaan dalam NU dipegang oleh faksi kiai-non politisi (syuriah), kemudian faksi politisi (tanfidiyah) mendominasi hingga paroh pertama dekade 1980-an, dan setelah itu hingga sekarang NU berada di tangan faksi "Cendekia".

Pendahuluan

Menjelang pergolakan perebutan kekuasaan di negeri ini (Indonesia) pada tahun 1965, ketika gerakan "aksi sepihak" merebak di berbagai pelosok negeri dan radikalisasi massa-militan PKI meningkat di mana-mana, D.N. Aidit, ketua PKI saat itu, menyatakan bahwa "*ibu pertiwi sedang hamil tua*". (Billah : 1998). Pernyataan ini dapat dilihat sebagai simbol yang dipergunakan untuk menegaskan pandangan faksi politik di dalam partainya tentang kondisi yang dianggapnya matang bagi suatu gerakan merebut kekuasaan yang sah. Sangat mungkin Aidit pada saat itu mengacu ke teori struktural Marxis tentang gerakan sosial, yang menekankan empat unsur penting dari kondisi yang mendukung meledaknya gerakan sosial. Keempat unsur yang ditekan oleh Marx adalah : *Pertama*, semakin tingginya tingkat penghisapan (eksploitasi) atas buruh; *Kedua*, semakin meningkatnya kesadaran revolusioner buruh; *Ketiga*, tersedianya organisasi buruh, dan; *Keempat*, meningkatnya pertikaian (konflik) antara buruh dengan kapitalis. (Irsyam : 1984).

Adalah Semelser, seorang tokoh madzhab struktural dalam Laode Ida (1995), menyatakan bahwa gerakan sosial hanya terjadi bilamana terjadi kondisi yang sangat matang. Kondisi tersebut adalah kondisi struktural yang kondusif, ketegangan struktural, tumbuh dan tersebarnya keyakinan umum, adanya faktor yang mempercepat, adanya mobilisasi partisipan untuk bertindak dan

melemahnya kontrol sosial. Keenam unsur ini terlihat menjelang peristiwa 30 September 1965. Kondisi struktural yang kondusif pada nampak dari adanya kebebasan bagi kelompok-kelompok kepentingan (termasuk partai politik) untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan kelompoknya masing-masing. Ketegangan struktural antar kelompok kepentingan dan partai (terutama antara kelompok yang pro komunis termasuk faksi militer tertentu, dengan kelompok anti-komunis yang didukung oleh faksi militer yang lain) semakin menjadi-jadi. Meratanya keyakinan akan terjadinya 'goro-goro' (keadaan serba kacau). Mobilisasi massa semakin tinggi, terutama massa pro-komunis, serta kontrol sosial melemah. Ketegangan struktural dengan sangat mudah terlihat jika struktur kelompok yang tidak memperoleh privelese yang memadai (Gurr dalam Abdul Aziz Thaba :1996) dan tidak memiliki akses pada sumber-sumber kekayaan, kekuasaan, dan martabat , sehingga kelompok itu terasing secara sosial dan privelesinya secara nisbi. Akan tetapi untuk bisa memunculkan gerakan sosial, keterasingan sosial dan perampasan nisbi yang terjadi itu perlu dirasakan oleh kelompok sebagai akibat dari tatanan sosial yang tidak sah (Blumer: 1978).

Pergolakan Internal NU

Pergolakan internal NU dapat dilihat dari tatanan/struktur dan tatacara/prosedur yang berlaku di dalam komuniti/organisasi NU dalam masalah pembagian kekuasaan di antara berbagai unsur-unsur struktural yang mendukung dan faksi-faksi internal yang saling bersaing, atau dapat pula ditinjau sifat dan proses dari struktur pengambilan keputusan di dalam organisasi, dan bagaimana berbagai faksi yang bersaing melakukan tawar-menawar dan saling tukar-menukar sumber-sumber, serta perbedaan-perbedaan yang berhubungan dengan dukungan. Sejak berdirinya hingga saat ini organisasi NU tidaklah tersusun dari unsur-unsur pendukung internal yang tidak mengalami pergeseran dan perubahan, bukan pula berada di dalam ruang eksternal kosong yang tak bergerak. Dengan kata lain *jama'ah* dan *jam'iyah* NU telah dan terus menerus mengalami pengayaan atau pemiskinan ornamental, dan pergeseran-fundamental (Effrat : 1972). Pengayaan ornamental terjadi terutama sejak NU telah menjadi partai politik ketika partai itu harus berhadapan dengan upaya mempengaruhi sikap dan partisipasi individual anggota (*articulate down*) partai-partai lainnya untuk merebutkan dukungan massa, baik menjelang pemilu maupun sesudahnya ketika politik massa sedang marak dengan membentuk organisasi-organisasi *niven*-nya hampir di semua lini (Muslimat NU, Pemuda

Ansor, Fatayat NU, IPNU dan IPPNU, PMII dsb.). Sebaliknya ketika politik massa menyurut, terjadilah pemiskinan ornamental, yang ditandai oleh tidak berfungsinya lagi organisasi massa tertentu (Pertanu, sarbumusi dan Lesbumi).

Pergolakan NU sampai dengan parohan pertama dasawarsa 1980-an telah dibahas secara mendalam oleh pengamat NU (Irsyam : 1984), dan dinamika internal setelah NU kembali ke Khittah 1926 sampai dengan parohan pertama dasawarsa 1990-an ditelaah secara luas oleh (Van Brusinessen : 1997; Ida : 1995). Dari kedua tulisan itu terlihat adanya pembagian kekuasaan internal, yang mula-mula pada saat berdirinya bagian terbesar dipegang oleh faksi *syuriyah* (sampai pada tahun 1950-an) kemudian secara perlahan tetapi pasti bagian terbesar kekuasaan itu berada di tangan faksi politik (*tanfidiyah*) sampai parohan pertama dasawarsa 1980-an (Irsyam : 1984), dan terakhir bagian kekuasaan terbesar itu mulai direbut oleh faksi cendikia (Ida : 1995) generasi muda baru. Dalam menelaah pergolakan struktur di dalam NU, berbagai pengamat mempergunakan sistem yang berbeda-beda dan penekanannya yang berbeda.

Kebanyakan penulis menggunakan sistem “belah dua” , misalnya *kiai* dan *politisi* (Adnan : 1982), sedangkan istilah faksi “*cendekia*” digunakan oleh Laode Ida (1995), faksi PBNU dan faksi cabang-cabang (Nakamura : 1982) dan kelompok tua dan kelompok muda. Penulis yang menggunakan sistem “belah tiga” adalah Irsyam (1984) dan Ida (1995). Sedangkan Wahid, terutama setelah kembali ke khittah 1926, membagi unsur-unsur di dalam NU menjadi kelompok *khittah murni*, *khittah plus* dan *khittah minus*. Pengelompokan unsur-unsur yang dilakukan oleh para penulis itu pada umumnya mengacu ke ketegangan hubungan di antara kelompok atau aksi-faksi yang seringkali berakar pada kepentingan politik jangka pendek.

Meski demikian para pengamat cenderung sampai pada kesimpulan yang hampir sama yakni bahwa perubahan “struktur sosial politik NU” adalah merupakan hasil dari interaksi antara dinamika internal yang terjadi di dalam *jam'iyah* NU dengan perubahan sosial politik eksternal di lingkungan sekitaran NU, yang keduanya bekerja secara dialektik, dan kadangkala bersambatan.

Kubu-kubu Paradigmatik yang Berlaga

Gus Dus (panggilan akrab Abdurrahman Wahid) dengan kesal pernah menyatakan bahwa sekarang ini terdapat setidaknya tiga kubu yang berlaga di dalam NU, yaitu kubu “*khittah murni*”, kubu “*khittah plus*” dan kubu “*khittah minus*” (Ida : 1995). Billah (1998) menjelaskan bahwa berbagai kubu sedang

berlaga di dalam tubuh NU. Setidaknya ada tiga kubu besar, disamping percabangannya dan sempalan-semपालannya, bila dilihat dari kiblat (orientasinya) pada perubahan, yakni : (a) kubu pro kemapanan (anti perubahan) yang tidak menginginkan perubahan apapun dari kondisi dan situasi NU, oleh karena mereka menanggung keuntungan dan manfaat yang besar atas situasi “*status quo*” ini; (b) kubu pro-perubahan reformatoris, yang menginginkan perubahan-perubahan tingkat peralatan (*instrumental*), tanpa melakukan perubahan pada tataran nilai-nilai kebudayaan (kubu inovatif); dan (c) kubu pro-perubahan transformatoris, yang menghendaki baik perubahan nilai-nilai budayanya (organisasi NU) maupun pada tataran peralatan kelembagaan organisasi NU (dalam versi Mertonian kubu ini disebut sebagai kubu pemberontak).

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa pada awalnya faksi *tanfidiyah* hanya berfungsi dibidang administratif-organisatoris, seluruh kebijakan keputusan berada pada faksi *syuriah*, secara perlahan tapi pasti *tanfidiyah* mentransformasikan peran dirinya tidak lagi hanya sekedar melakukan administratif-organisatoris di bawah hegemoni¹ *syuriah*², melainkan juga melakukan dan mengukuhkan dirinya peran utamanya dalam bidang politik. Peran politik *tanfidiyah* ini memperoleh peluang untuk keluar dari hegemoni *syuriah*, menurut Irsyam (1984) ini dipicu oleh adanya kekecewaan terhadap alokasi dan distribusi kekuasaan di dalam Masyumi tahun 1952, sehingga NU keluar dari Masyumi dan menjadi partai politik sendiri. Kesempatan emas ini dipergunakan dengan baik oleh faksi *tanfidiyah* untuk melangkah sebagai gerakan tandingan politisi *tanfidiyah*.

Para penulis mencatat bahwa keputusan NU untuk keluar dari Masyumi dan menjadi partai politik ini membawa dampak berupa munculnya faksi-faksi di dalam elite NU, yakni faksi *syuriah-pesantren non politisi*, faksi *syuriah politisi* dan faksi *politisi tanfidiyah*. Faksi *syuriah* pesantren non politisi semakin lama semakin surut dan terpinggirkan seiring dengan semakin maraknya kegiatan politik NU, sebaliknya faksi *syuriah* politisi memperoleh ruang dan peran yang cukup longgar³ ketika *syuriah* dipimpin oleh Rois Aam KH. Abdul Wahab Hasbullah yang mempunyai kecenderungan kuat untuk mengutamakan politik. Akibatnya, sebagaimana yang ditulis oleh Irsyam (1984 : 87) *syuriah* tidak lagi utuh karena para anggotanya masing-masing memiliki jalinan interaksi dengan politisi yang berbeda-beda. Faksi *syuriah* politisi memiliki kepentingan yang terkait erat dengan kepentingan politisi *tanfidiyah*; Oleh karenanya disamping terjadi kemungkinan terjadi persekongkolan, perselingkuhan, juga muncul persaingan, ketegangan dan pertikaian untuk merebutkan kekuasaan di dalam organisasi⁴; Apalagi pada tahap ini muncul

tenaga-tenaga yang lebih muda, serta *tanfidiyah* mulai pula melakukan perekrutan tenaga yang bukan berasal dari pesantren, bahkan rekrutmen para pemimpin itu mengesampingkan prosedur organisasi dan potensi pesantren, seperti dikatakan Irsyam (1984 :107) Idham Chalid pun direkrut dengan cara-cara seperti itu, yakni melalui hubungan pribadi.

Dampak awal merosotnya pamor faksi *syuriyah* tersebut terasa sekali sampai sekarang, yaitu semakin mendominasinya peran faksi *tanfidiyah* di dalam organisasi NU. Akibat dari pergeseran-pergeseran yang terjadi itu pada tingkat struktural adalah bahwa personil politisi semakin bertambah banyak dan beragam yang tidak saja dari personil *tanfidiyah*, akan tetapi juga ditambah dengan pejabat-pejabat *syuriyah* yang melakukan peran politik. Irsyam (1984) mencatat bahwa *syuriyah* dan *tanfidiyah* sama-sama memainkan peran sebagai politisi, seperti kita lihat dalam banyak kasus. Bahkan kasus Pemilihan Gubernur Jawa Timur peran *syuriyah* begitu nampak.

Mencermati apa yang digambarkan oleh Billah (1998), tentang berbagai kubu yang sedang berlaga di dalam organisasi NU cukup memberikan gambaran yang jelas. Bahkan ia katakana NU selalu diwarnai persaingan perebutan kekuasaan internal.

Gambar / skema yang di buat oleh Billah (1998) memperlihatkan bahwa kubu pro-perubahan di dalam tubuh NU, yang menghendaki sosok sosial-politik NU yang baru, masih tetap menghadapi kubu pro-kemapanan dengan jumlah yang ditunjukkan cukup besar dan pengaruhnya masih cukup kuat, *syuriyah*-politisi, politisi penebeng, dan politisi parasit. Para politisi yang nyaris tidak mempunyai akses ke pesantren berupaya melakukan kegiatan *articulate down* (mencari dukungan ke bawah) dengan atau tanpa persekongkolannya *syuriyah*-politisi, misalnya dilakukan dengan menyelenggarakan kelompok diskusi dan pelatihan politik atau membangun jaringan sendiri (umumnya yang dijaring adalah kelompok muda yang silau terhadap pamor politisi, atau yang kurang memiliki prospek dalam bidang professional). Kegiatan *articulate across* dilakukan dengan membangun persekutuan-perskutuan baru bersama mereka yang dipinggirkan atau yang terpentol dari permainan politik diberbagai tingkat. Sedangkan para *articulate up* kurang berarti karena kemampuan konseptual kelompok ini kurang memadai dan kecanggihan artikulasainya rendah-meskipun sebagian anggota kelompok ini berhasil meraih patronase politik pada beberapa elite kekuasaan dalam birokrasi pemerintah atau pada kelompok militer (Billah :1998)., sehingga tidak membahayakan kubu-perubahan. Upaya kubu pro-kemapanan terutama yang dilakukan oleh faksi politisi untuk menggoyang kubu

pro-perubahan, meskipun hanya sedikit mendatangkan ancaman serius bagi kubu pro-perubahan, akan tetapi seringkali juga merepotkan, apalagi bila dilihat jumlah orang dalam kubu pro-perubahan tidaklah cukup banyak, meski mempunyai pengaruh dan kemampuan artikulasi yang memadai. Manuver kasus SDSB pernah dimanfaatkan oleh kubu ini untuk menggoyang kepemimpinan Abdurrahman Wahid.

Upaya *articulate down* yang dilakukan oleh kubu pro-perubahan ini terlihat dari berbagai kegiatan *halaqah*, lokakarya, dan seminar yang diikuti oleh berbagai pesantren di Jawa mengenai berbagai hal dari yang bersifat refleksi teologis sampai persoalan sosial yang selalu muncul dan terus ditangkap oleh kubu ini.

Knerja / Kiblat	Produktif	Reproduktif	Non-produktif	
			Penebeng	Parasit
Pro-kemapanan	(?)	pesantren; syuriah non-politisi {pengaruh sedang}	Politisi; syuriah politisi (sangat banyak) {pengaruh agak kuat}	unsur politisi (banyak) {pengaruh kurang}
Pro-perubahan reformatoris	Kiai pesantren non politisi generasi muda aktivis liberal (sedikit banyak) {pengaruh kuat}	unsur generasi muda (sedikit) {pengaruh sedang}	unsur generasi muda (sangat banyak) {pengaruh kurang}	unsur generasi muda (sedikit ?) {pengaruh kecil}
Pro-perubahan Transformatoris	Generasi muda aktivis radikal (sangat sedikit) {pengaruh kurang}	unsur generasi muda (sangat sedikit) {pengaruh kurang}	unsur generasi muda (banyak) {pengaruh kurang}	unsur generasi muda (sedikit) {pengaruh kurang}

(...) = Jumlah Pendukung {...} kuatnya pengaruh

Skema faksi-faksi yang sedang berlaga di dalam NU

Kaitan eksternal

Pada awal abad 20 ini lahir gerakan pembaharuan Islam Muhammadiyah dan Gerakan politik Sarekat Islam. Gerakan pembaharuan Islam ini dirasakan

sebagai ancaman terhadap posisi para kiai dan umat Islam yang disebut tradisional di pedesaan, sehingga pertikaian di antara kubumodernis kaum pembaharu dan kubu tradisional para kiai pesantren itu mencuat di dalam kongres Al Islam, baik di Yogyakarta pada tahun 1925 maupun di Bandung pada tahun 1926 (Alfian dalam Noer : 1991). Oleh karena itu banyak pengamat menyatakan bahwa NU adalah merupakan wujud dari gerakan tandingan terutama atas gerakan pembaharuan Islam dalam negeri (Irsyam : 1982); meskipun latar belakang internasional ikut berpengaruh (Bruinessen : 1997).

Gerakan pembaharuan itu berpasangan dan bersaing dengan gerakan tandingannya dalam pergulatan kebudayaan, sosial dan juga politik (Billah :1998). Persaingan politik mencapai puncaknya ketika NU keluar dari Masyumi dan mendirikan partai sendiri, pertikaian semakin memburuk ketika Soekarno membubarkan dan melarang partai Masyumi, sedangkan NU justru mendukung konsepsi Soekarno, bahkan NU dengan tegas menyatakan Soekarno sebagai *waliy al amri al dharuri bi al syaukah*, sehingga dengan gelar yang diberikan NU ini seringkali mendapat kritik yang cukup tajam dari lawan politiknya (Bruinessen : 1997 : 70-76).

Gerakan pasangan saling bersaing itu nampak mengurangi ketegangan dan berusaha saling mendekat, atau setidaknya terjadi semacam gencatan senjata antara dasawarsa 70-an dan awal 80-an, salah satu dari upaya pendekatan ini adalah dibentuknya P3M, yang pada awalnya sebenarnya merupakan wahana persekutuan antara berbagai aliran dalam Islam (kubu pembaharu dan kubu tradisional) yang bertujuan mula-mula melibatkan pesantren di dalam proses pembangunan. Sifat sebagai persekutuan (aliansi) ditujukan oleh bergabungnya tokoh-tokoh dari berbagai aliran itu : Prof. Dawam Rahardjo, Dr. Adi Sasono (Muhammadiyah, Masyumi, HMI), Utomo Dananjaya (Pesis,PII), almarhum KH. Sholeh Iskandar (PUI,BKSPP), Masyumi; Abdurrahman Wahid, KH. Yusuf Hasyim, KH.Sahal Mahfudz, KH. Abdullah Syarwani, Nasihin Hasan (NU); Tuty Alawiyah. Meski demikian pada prakteknya dan akhirnya P3M cenderung ke kelompok NU karena kebanyakan para pelaksananya adalah orang-orang Nu. Ketika P3M dipimpin direktornya yang pertama yakni Nasihin Hasan kiblat ideologis-nya cenderung kurang jelas karena merupakan campuran dari unsur konservatisme dan reformisme, akan tetapi ketika kemudian ia digantikan oleh Masdar Farid Mas'udi, ideologinya-secara berangsur-angsur bergerak kearah ideologi transformatoris, dalam arti ia berkiblat pada perubahan sosial dan kebudayaan yang mendasar, antara lain menyentuh segi-segi ajaran teologi dan ajaran *ahlussunnah wal jama'ah* (Billah :1998).

Gerakan saling mendekati tersebut kembali memanas pada paohan dasawarsa 80-an ketika kesenjangan antara keduanya kembali menganga, lebih-lebih setelah kelahiran ICMI pada awal tahun 1990an yang kemudian ternyata lebih banyak merekrut anggotanya dari kubu pembaharu; dan Gus Dur secara lantang saat itu melontarkan kritiknya terhadap ICMI (Billah : 1998). Kemudian kembali sedikit agak mesra ketika masing-masing saling mendekati untuk menghalangi Megawati Soekarnoputri maju ke kursi Presiden pada tahun 1999, sekalipun justru gerakan ini menjadi pemicu perpecahan yang lebih dahsyat. Kekecewaan kedua belah pihak tak dapd dihindarkan, masing-masing dari jama'ahnya saling marah. Masyarakat Situbondo yang notabenenya adalah warga NU, yang sangat fanatic terhadap tokoh NU (kiai) mereka marah dengan menebang pohon untuk dirobuhkan, sehingga membuat jalanan macet yang merugikan masyarakat banyak.

Akhir-akhir ini, nampaknya upaya untuk saling mendekati semakin nampak. Tokoh Modernis semisal Syafi' I Ma'arif, Amin Rais dan Nurcholish Madjid sering b erkunjung ke k kantong-kantong NU. Terlepas apakah ini merupakan kepntingan sesaat, karena ingin mendapatk dukungan politik atau tidak, tapi yang jelas gerakan tersebut digulirkan. Adalah KH. Hasyim Muzadi, yang notabenenya dia seorang ketua *tanfidiyah* PBNU, yang sering disebut-sebut sebagai calon presiden, sekalipun belum jelas partai apa yang akan mencalonkan, ia sering mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh modernis. *Selinthinga gandeng rentengnya* Hasyim Muzadi dengan Syafi' I Ma'arif sudah bukan rahasia lagi seluruh lapisan, baik warga Muhammadiyah dan NU kiranya mereka sudah menyaksikan.

Akan tetapi ada yang mengatakan, dari sejarahnya tidak pernah kubu modernis dan tradisionalis bisa *gandeng rentheng*, dalam arti yang sebenarnya. Gandeng renteng ini pasti bersifat semu dan sementara karena masing-masing di antara keduanya sebenarnya ingin mencapai tujuan yang tidak mungkin bisa dipertemukan yakni politik. Maka sangat wajar jika dikatakan, apabila NU yang mendominasi birokrasi, Muhammadiyah adalah pesaingnya dan sebaliknya.

Kubu Ideologis yang Berlaga, dan Faksi yang Berlaga

Uraian di atas menunjukkan bahwa NU tidak berada di dalam ruang yang kosong, demikian juga dinamika pergolakannya tidaklah tanpa memiliki kaitan dengan eksternal. Irsyam (1984) dan Ida (1995) dan sejumlah pengamat lain (Bruinessen : 1997) memaparkan kaitan antara dinamika internal NU dengan unsur-unsur eksternal antara lain lewat apa yang disebut sebagai

patronase politik. Kelompok eksternal mana yang menjalin hubungan dengan atau di *cantholi* oleh faksi-faksi yang secara eksternal bertikai itu? Faksi yang berbeda mencoba memilih *cantholan* yang berlainan. Di dalam politik Indonesia mutakhir, setidaknya ada tiga buku ideologis yang bersaing (Robinson dalam Billah : 1998), yaitu (a) kubu teknokrat liberal yang berkiblat pada pasar bebas (*free market-oriented liberal-technocrat*); (b) kubu perancang ekonomi nasionalis yang berkiblat pada negara *organic-statist* (*nationalist-centered economic planners*), dan (c) kubu nasionalis kerakyatan (*populist-nationalist*). Ketiga kubu ideologis ini melahirkan actor politik yang saling bersaing untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan ekonomi dan pembangunan selama periode pasca '65 (Robinson & Hadiz dalam Billah : 1998). Kubu liberal terdiri dari ekonom neo-klasik berpendidikan Barat yang dulu berkumpul di lembaga-lembaga perencanaan seperti Bappenas dan Departemen Keuangan.

Kubu kedua cenderung yakin pada pandangan *organic statism* dan percaya pada sentralisasi kekuasaan dan perencanaan ekonomi terpusat pada Negara nasionalis. Kubu ini terdiri dari berbagai faksi yang saling bersaing. Faksi pertama adalah militer, yang meskipun merupakan organisasi kompak, akan tetapi di dalamnya terdapat sub-faksi, yakni angkatan '45 yang terdiri dari sayap militer yang *politis-pragmatis*, dan sayap yang *principled*, dan perwira-perwira baru generasi muda pasca angkatan '45 (Jenkins, Britton dalam Billah: 1998).

Kubu nasionalis populis menentang apa yang dianggapnya *free fight capitalism*, dan berpendapat bahwa Negara memiliki tanggung jawab atas kepentingan rakyat, tetapi juga menentang sengit kerajaan-kerajaan politik dan ekonomi yang memperoleh keuntungan dari perlindungan Negara. Kubu kurang memiliki basis kekuatan yang kuat (Billah : 1998).

Tarikan dari Luar atas Gerakan Internal NU

Di gambarkan oleh Billah (1998), bahwa sosok sosial politik NU dari masa kemasa menjadi selalu aneh dan rumit bilamana dikaitkan dengan kubu ideologis dan faksi-faksinya yang ada di dalam peta politik. Para politisi NU mencari *patronase politik* dari berbagai faksi yang berbeda dari kubu *organic-statism*, seolah hendak mendemonstrasikan secara terang-terang etika politik yang mereka yakini betul kebenarannya yaitu " *di dalam politik, tiada kawan dan lawan yang permanent, yang ada adalah kepentingan yang permanent*". Etika politik semacam ini seringkali diungkapkan oleh para politisi NU, dan dipergunakan oleh mereka untuk menyembunyikan kepentingan mereka

sendiri (Billah :1998). Doktrin semacam ini akan membuka kemungkinan terjadinya perubahan yang cepat persekutuan-persekutuan yang dibuat.

Dalam banyak kasus politisi NU, sering dinilai berwajah dua, hal ini bisa difahami karena memang adanya doktrin seperti tersebut, sekalipun tidak banyak orang tahu dari mana dan siapa yang membuat doktrin itu, yang jelas sampai saat ini doktrin tersebut atau paling tidak kita bisa melihat implikasi perilaku politisi NU saat dari masa kemasa yang selalu berubah-ubah.

Footnotes

¹ Hegomoni adalah merupakan konsep yang terpenting di dalam pemikiran Gramsci. Pengertian hegomoni (eugemonia) sebenarnya untuk pertama kalinya diterapkan dalam sejarah Yunani Kuno yang berarti posisi yang diklaim oleh negara Negara kota (city state atau polis) terhadap negara-negara lain . Selanjutnya hegemoni diartikan sebagai suatu kepemimpinan dari suatu negara tertentu terhadap negara-negara lain yang terkait secara ketat ataupun longgar ke dalam kesatuan Negara pemimpin. Sedangkan Mao Tse Tung menggunakan hegomonisme untuk menandai satu dominasi dari suatu Negara atas yang lainnya tetapi yang bukan imperialisme; dan Lenin menggunakan kata itu untuk menunjuk kepemimpinan politik di dalam revolusi yang demokratis yang didasarkan pada persekutuan dengan bagian-bagian dari petani, atau yang oleh Gramsci digunakan untuk menggambarkan bagaimana dominasi dari satu kelas atas kelas yang lain dicapai lewat rangkaian ramuan alat-alat politik dan ideologis (how the domination of one class over others is achieved by a combination of political and ideological means). Ideologi dominant atau hegomonis ini dapat menyediakan suatu pandangan dunia yang lebih koheren dan sistematis yang bukan saja mempengaruhi massa rakyat akan tetapi juga menyediakan landasan organisatoris bagi lembaga sosial.

² Peran syuriah sebagai politisi ini diawali oleh KH. Abdul Wahab Hasbullah ketika menjabat Rois Aam Syuriah yang dianggap mempunyai kecenderungan politik yang kuat untuk mengutamakan politik dari pada hukum Syar'i. Secara lebih transparan, Irsyam mengatakan bahwa dalam banyak hal syuriah di bawah kepemimpinan Abdul Wahab Hasbullah itu terlarut dalam peran politisi. Syuriah seringkali menyusun hukum syar'i dengan cara talfiq, yaitu memetik –metik hukum dari keempat madzhab tanpa memperhatikan sistematikanya. Malahan tidak jarang hukum syar'i yang disusun pada waktu itu hanya berdasar pada shahabat Nabi (Irsyam : 1984 : 87-88).

³ Irsyam (1984) mencatat bahwa syuriah dan tanfidiyah sama-sama memainkan peran sebagai politisi, artinya batas yang tegas dalam tradisi pesantren, yang membedakan dan sekaligus mengatur hubungan antara kiai dan santri di dunia pesantren menjadi kabur (atau perlahan hilang sama sekali) ketika dipergunakan di dalam tubuh NU untuk mengatur hubungan antara ulama dan politisi.

⁴ Irsyam (1984) menyebutnya bahwa keterlibatan syuriah bukanlah sekedar hanya keterlibatan dengan masalah-masalah politik saja tetapi juga keterlibatan dalam pengertian bahwa ulamapun melakukan aliansi dengan kalangan politisi. Selanjutnya ia menyatakan bahwa para politisi yang sebetulnya dalam posisi subordinasi para ulama dapat melakukan penetrasi ke kalangan syuriah (p. 96).

DAFTAR PUSTAKA

- Bruinessen, Van Martin, *NU : tradisi, relasi-relasi kekuasaan kuasa, dan mpencarian wacana baru*, LKIS Yogyakarta 1997.
- Billah, MM, *Pergolakan NU dan Kelompok Islam*, (artikel) Tashwirul Afkar, Edisi No 2 Mei 1998 Lakspesdam NU Jl. Kuningan Barat Jakarta.
- Irsyam, Mahrus , *Ulama dan Politik* , Yayasan Perkhidmatan Jakarta 1984.
- Ida, Laode, *Dinamika Internal NU setelah Kembali ke Khittah 1926*, Tesis PPS UI Jakarta 1995.
- Marijan, Kacung, *Quo Vadis NU : Setelah Kembali ke Khittah 1926*, Erlangga Jakarta 1992
- Mulkhan, Abdul Munir, *Runtuhnya Mitos Politik Santri*, Sipress Yogyakarta 1992
- Thaba, Abdul Aziz, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Gema Insani Press Jakarta 1996.
- Wahid, Abdurrahman, *Muslim di Tengah Pergumulan*, Lepenas Jakarta 1984 .
- Wahid, Abdurrahman, *NU dan Islam di Indonesia Dewasa ini*, Prisma, XII (4) 1984.
- Yusuf, Slamet Effendy, et.al. *Dinamika Kaum Santri : Menelusuri Jejak dan Pergolakan Internal NU*, CV. Rajawali Jakarta 1983